



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 23 Januari 2020

Halaman: 10

► INSTANSI PEMERINTAH

PN Jogja Berkomitmen Ramah Difabel

JOGJA—Pengadilan Negeri (PN) Jogja berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan aksesibilitas peradilan bagi difabel. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan atau *memo of understanding* (MoU) dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Rabu (22/1).

Kepala PN Jogja, Budi Prasetyo, menjelaskan selama tahun lalu pihaknya telah mencapai beberapa target, seperti perbaikan pelayanan, pos bantuan hukum (posbakum), manajemen anti-penyuapan, reformasi kebijakan dan akreditasi penjaminan mutu. Capaian-capaian itulah yang mengantarkan PN Jogja lantas menerima predikat Wilayah Benas Korupsi (WBK).

"Akan kami tingkatkan terus dengan pencanangan pembangunan zona integritas, sehingga ditargetkan dapat meraih predikat WBBM tahun ini," ujarnya sesuai penandatanganan MoU, Rabu.

Penandatanganan MOU dilakukan bersama Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA). Sejak 2018, PN Jogja telah menjalin kerja sama dengan SAPDA untuk menyediakan pelayanan ramah difabel dan anak.

Sejumlah fasilitas fisik yang sudah bisa dinikmati diantaranya ramp, alat bantu, toilet aksesibel dan ruang tunggu khusus difabel. Selain itu, PN Jogja juga telah menyediakan pendamping bagi difabel yang berhadapan dengan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Lebih penting lagi, staf dan penegak hukum PN Jogja juga telah dibekali pemahaman soal difabel, sehingga mereka telah memiliki perspektif yang jelas soal difabel, bahwa difabel memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang non difabel.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, berharap PN Jogja terus meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, khususnya terkait data. "Agar lebih mudah terhubung dengan instansi di Kota Jogja. Bisa bertukar data antar instansi sehingga masyarakat bisa memperoleh banyak informasi dengan mudah," katanya.

Dia juga mengapresiasi program kerja sama PN Jogja dengan lembaga perguruan tinggi. Kerja sama ini memungkinkan keduanya saling *sharing* ilmu. "PN Jogja bisa memerikan pelatihan monitoring persidangan, pelatihan hukum acara sistem peradilan. *Feedback*-nya dari kampus *sharing* teori baru yang berguna bagi penegakan hukum," ucapnya.

(Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005